



Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir

Fretty Luciana Malau Gurning¹, Halking²

¹⁻² Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

E-mail: frettyluciana@gmail.com, halking123@unimed.ac.id

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 2022

Korespondensi Penulis: frettyluciana@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the economic empowerment of the community in the Family Hope Program (PKH) with a focus on a case study in Paraduan Village, Ronggur Nihuta District, Samosir Regency. The method used is descriptive qualitative research, with data collection through interviews, observation, and documentation. The data used consists of primary data obtained directly from informants and secondary data derived from supporting documents. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The results of the study indicate that the community's understanding of the concept of empowerment has begun to form, although its implementation in daily life is not yet optimal. Most beneficiaries still interpret empowerment narrowly, only as material assistance, not as a process to achieve economic independence. The role of the community in the implementation of the program tends to be passive, where they function more as objects receiving assistance rather than subjects actively involved in empowerment activities. The main goal of empowerment to increase economic independence and welfare has not been fully achieved. This is influenced by limited motivation, minimal skills, and less than optimal support from the village government and PKH facilitators. Designed empowerment strategies, such as skills training and business mentoring, have not been implemented consistently and are not fully based on the local potential of the community. A more participatory approach, integration of local potential, and ongoing mentoring are needed so that the program can encourage behavioral change and increase the independence of beneficiaries. This research demonstrates that the success of economic empowerment through the Family Hope Program (PKH) depends not only on the assistance provided, but also on active community involvement, government support, and a targeted and sustainable strategy.*

Keywords: *Economic Empowerment, Family Hope Program, Village Community, Ronggur Nihuta, Samosir.*

Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dengan fokus pada studi kasus di Desa Paraduan, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang berasal dari dokumen pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep pemberdayaan telah mulai terbentuk, meskipun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari belum optimal. Sebagian besar penerima manfaat masih memaknai pemberdayaan secara sempit, hanya sebagai bantuan materi semata, bukan sebagai proses untuk mencapai kemandirian ekonomi. Peran masyarakat dalam pelaksanaan program cenderung pasif, di mana mereka lebih berfungsi sebagai objek penerima bantuan daripada subjek yang aktif terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Tujuan utama pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan motivasi, minimnya keterampilan, serta kurang optimalnya dukungan dari pemerintah desa dan pendamping PKH. Strategi pemberdayaan yang telah dirancang, seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha, belum terlaksana secara konsisten dan belum sepenuhnya berbasis pada potensi lokal yang dimiliki masyarakat. Diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif, integrasi potensi lokal, serta pendampingan yang berkelanjutan agar program dapat mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi melalui PKH tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat, dukungan pemerintah, serta strategi yang terarah dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Program Keluarga Harapan, Masyarakat Desa, Ronggur Nihuta, Samosir.

1. PENDAHULUAN

Secara umum pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan langkah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga kurang mampu melalui pendekatan terpadu. Pendekatan ini mencakup pemberian bantuan sosial bersyarat dan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga. Tujuan dari program ini adalah memberikan bantuan keuangan sementara kepada keluarga miskin agar mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi mereka secara bertahap.

Pemberdayaan dalam konteks PKH tidak hanya berfokus pada bantuan tunai, tetapi juga pada pengembangan keterampilan, pelatihan kewirausahaan, serta akses ke berbagai peluang ekonomi yang dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Melalui pendampingan yang intensif, PKH berusaha mengubah pola pikir dan memperkenalkan cara-cara baru untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi dapat mandiri dan berkembang secara ekonomi dalam jangka panjang. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan inklusif, pemberdayaan ekonomi dalam konteks program keluarga harapan (PKH) diharapkan dapat menghasilkan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam sebuah konsep pemberdayaan Masyarakat lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (Widani, 2022)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses pembangunan kapasitas individu dan komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. melalui pelatihan keterampilan, manajemen usaha, dan pengembangan produk olahan, yang secara nyata mampu meningkatkan pendapatan keluarga dalam kegiatan local (Berutu et al., 2020), program pemberdayaan seperti PKH memiliki peran penting dalam menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Menurut (Siahaan & Pinem, 2024) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang tepat mampu menurunkan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan di sektor pertanian dan peternakan.

Indonesia pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Berbagai inisiatif, seperti program pelatihan keterampilan, akses modal, dan pendampingan usaha, telah diluncurkan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Misalnya, program UMKM

(Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan produk dan memperluas pasar, dan juga upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional (Imran & Indriani, 2022). Selain itu pemanfaatan teknologi digital juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal, dengan mempermudah akses ke pasar yang lebih luas. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan ekonomi, diharapkan bisa tercipta ketahanan ekonomi yang lebih baik, serta mengurangi kesenjangan sosial di berbagai daerah, pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH)

Melalui Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai pengarah dan pengawas dalam pelaksanaan program. Pemerintah desa, khususnya, berperan dalam mendata keluarga penerima manfaat, memfasilitasi sosialisasi, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sebagai penerima manfaat juga memiliki peran penting dalam keberhasilan program ini. Mereka dituntut untuk aktif menjalankan kewajiban yang ditetapkan, seperti memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Namun, pada praktiknya, keterlibatan masyarakat masih terbatas, karena sebagian besar menganggap program ini sekadar bantuan konsumtif tanpa memahami nilai pemberdayaan ekonomi yang menjadi tujuan utamanya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat perlu diperkuat agar program PKH benar-benar berdampak pada peningkatan kemandirian ekonomi keluarga miskin di tingkat desa.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di Sumatera Utara telah menjadi fokus utama berbagai pihak, terutama dalam sektor pertanian dan kewirausahaan. Salah satu inisiatif penting adalah yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) Sumatera Utara, yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan. Mereka mengadakan seminar untuk membahas ketahanan pangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian.

Selain itu, HAPSARI, sebuah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, juga aktif dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan rentan melalui pelatihan kewirausahaan berkelanjutan. Mereka mengadakan bimbingan teknis yang bertujuan untuk mengembangkan produk eco green yang mendukung kesejahteraan ekonomi

dan keberlanjutan lingkungan. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Di Kabupaten Samosir, pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam program keluarga harapan (PKH) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Meskipun PKH telah memberikan bantuan tunai bersyarat kepada ribuan keluarga miskin, namun dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi masyarakat masih belum maksimal. Banyak masyarakat di Samosir yang belum mampu keluar dari ketergantungan terhadap bantuan karena belum tersedianya dukungan pemberdayaan ekonomi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kurangnya akses terhadap pelatihan keterampilan, modal usaha, serta pendampingan usaha menjadi hambatan utama dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Sebagian besar keluarga penerima PKH hanya memanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tanpa adanya langkah lanjutan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga melalui kegiatan produktif.

Desa Paraduan, yang terletak di Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, merupakan salah satu desa di kawasan Danau Toba yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian. Namun seperti banyak desa lainnya Desa Paraduan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Salah satu kendala utama adalah bahwa sebagian penerima tidak mengalokasikan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya. Banyak keluarga yang lebih memilih menggunakan dana PKH untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, seperti digunakan untuk membeli barang-barang mewah, berjudi, atau bahkan kebutuhan yang sifatnya rekreatif, daripada untuk keperluan pendidikan anak, gizi balita, atau peningkatan kesehatan ibu hamil sebagaimana yang diamanatkan oleh program. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan esensi program PKH sebagai upaya investasi sosial jangka panjang.

Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa,

pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai pengarah dan pengawas dalam pelaksanaan program.

Pemerintah desa, khususnya, berperan dalam mendata keluarga penerima manfaat, memfasilitasi sosialisasi, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Di sisi lain masyarakat sebagai penerima manfaat juga memiliki peran penting dalam keberhasilan program ini. Mereka dituntut untuk aktif menjalankan kewajiban yang ditetapkan, seperti memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Namun, pada praktiknya keterlibatan masyarakat masih terbatas, karena sebagian besar menganggap program ini sekadar bantuan konsumtif tanpa memahami nilai pemberdayaan ekonomi yang menjadi tujuan utamanya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat perlu diperkuat agar program PKH benar-benar berdampak pada peningkatan kemandirian ekonomi keluarga miskin di tingkat desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam program keluarga harapan (pkh) telah menjadi fokus kajian yang signifikan terhadap Masyarakat. Namun, penelitian ini menawarkan pembaharuan dengan menitik beratkan perlunya kesadaran masyarakat untuk mencapai ekonomi yang lebih efektif. Studi sebelumnya telah mengidentifikasi keberhasilan dalam meningkatkan keterampilan dan pendapatan masyarakat, namun juga mencatat adanya tantangan yang masih dihadapi, seperti akses informasi yang terbatas dan infrastruktur yang kurang memadai. Dengan mengumpulkan data terkini, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Dengan demikian, pembaharuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Paraduan.

Selain itu penelitian ini juga akan menyusun sebuah rekomendasi yang lebih tepat untuk meningkatkan sebuah efektifitas dan keberlanjutan inisiatif pemberdayaan ekonomi dalam program keluarga harapan (PKH) khususnya di Desa Paraduan. Berdasarkan pembaharuan tersebut penting kiranya untuk mengkaji penelitian ini lebih dalam karena sangat berkaitan langsung dengan upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk setempat. Kajian ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyalahgunaan dana bantuan oleh masyarakat penerima PKH yang telah diimplementasikan, serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses sumber daya dan peluang ekonomi. Dengan menganalisis dampak dari intervensi sosial, kita dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang perlu perbaikan, sehingga program-program tersebut dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga

dapat memberikan wawasan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan dapat diperkuat, sehingga mereka menjadi lebih mandiri dan proaktif dalam mengelola ekonomi lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi lapangan untuk memahami secara mendalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paraduan, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu mengungkap fenomena sosial secara alami melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terjun langsung ke lapangan, melakukan observasi, wawancara terstruktur, serta dokumentasi untuk menggali informasi dari informan kunci seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan penerima manfaat PKH. Lokasi ini dipilih karena adanya keterkaitan personal peneliti serta relevansi masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria dan tujuan penelitian tertentu (Aminah & Roikan, 2019; Hasan et al., 2022; Wahyudi et al., 2023).

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal, dan peraturan terkait. Instrumen penelitian yang digunakan mencakup pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi yang dirancang berdasarkan indikator pemberdayaan ekonomi dan pelaksanaan program PKH. Dalam proses analisis data, dilakukan tiga tahap utama, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk naratif yang sistematis, dan verifikasi data melalui diskusi sejawat dan konfirmasi lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan validitas temuan serta menyusun kesimpulan yang akurat dan bermakna dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Sugiyono, 2013; Rukajat, 2018; Nursanjaya et al., 2021).

Variabel utama dalam penelitian ini adalah "pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam program PKH" yang didefinisikan sebagai proses peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi melalui akses modal, pelatihan, dan dukungan sosial pemerintah. Definisi operasional disusun untuk memahami

persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap program yang sedang berlangsung. Peneliti menggali data secara mendalam untuk memahami hambatan, tantangan, serta strategi pemberdayaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik maupun kebijakan praktis dalam perbaikan program pemberdayaan sosial di tingkat desa (Sugiyono, 2020; Fajar Utomo & Effendi, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan tunai bersyarat serta peningkatan kapasitas individu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Desa Paraduan, pelaksanaan PKH telah mencakup pendataan penerima manfaat, pelatihan keterampilan, serta edukasi pengelolaan keuangan rumah tangga. Meskipun implementasinya telah berjalan sesuai prosedur, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masih rendah. Banyak penerima bantuan yang belum memahami sepenuhnya bahwa PKH bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan sarana untuk membangun kemandirian sosial dan ekonomi.

Pemahaman masyarakat terhadap konsep pemberdayaan dalam PKH umumnya cukup baik, sebagaimana terlihat dari tanggapan para informan seperti Ibu Nursalam Samosir, Ibu Kernita Sitanggung, dan Bapak Imran Samosir, yang menyadari bahwa program ini bertujuan membentuk keluarga yang mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan. Mereka menilai bahwa pelatihan keterampilan, edukasi kesehatan, dan literasi keuangan merupakan bagian penting dari program. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya motivasi penerima, pola pikir konsumtif, serta penyalahgunaan bantuan untuk kebutuhan yang tidak sesuai tujuan program, seperti pulsa, arisan, atau barang konsumtif lainnya.

Meskipun terdapat tantangan, manfaat PKH tetap dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama dalam membantu pembiayaan pendidikan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, dan mengakses layanan kesehatan dasar. Program ini juga berperan sebagai jaring pengaman sosial dalam situasi ekonomi sulit. Sasaran PKH pun telah ditetapkan secara selektif melalui DTKS dan verifikasi lapangan, menyasar keluarga miskin dengan ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Untuk mencapai hasil optimal,

diperlukan penguatan pendampingan, edukasi berkelanjutan, dan perubahan pola pikir agar PKH benar-benar menjadi jembatan menuju kemandirian keluarga penerima manfaat.

Penyajian Data (*Display Data*)

Subjek Penelitian	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH)						
	Implementasi	Peran	Tujuan	Strategi	PKH	Tujuan PKH	Manfaat PKH
1. Nursalam Samosir	Upaya meningkatkan kapasitas individu & rumah tangga agar mandiri secara ekonomi.	Hanya sebagai penerima, & terlibat aktif.	Agar warga mandiri dan tak tergantung bantuan.	Pendampingan dan edukasi pengelolaan dana.	Bantuan bersyarat untuk rakyat kecil.	Supaya anak tetap sekolah dan ibu hamil sehat.	Keluarga miskin dengan anak, ibu hamil, lansia.
2. Kernita Sitanggang	Proses membangun kemandirian dengan memanfaatkan sumber daya lokal.	Pernah ikut pelatihan, tapi tak lanjut.	Meningkatkan taraf hidup rumah tangga.	Pelatihan menjahit dan keterampilan rumah tangga.	Bantuan tunai untuk kebutuhan rumah tangga.	Turunkan angka putus sekolah dan perbaiki gizi.	Rumah tangga prasejahtera yang diverifikasi.
3. Imran Samosir	Meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga secara mandiri.	Tidak dilibatkan aktif, hanya dengar sosialisasi.	Supaya bisa bantu keluarga sendiri.	Dorongan usaha rumahan dari pendampingan.	Membantu keperluan anak dan ibu hamil.	Dukung keberlangsungan hidup warga miskin.	Keluarga dengan komponen PKH sesuai syarat.
4. Encis Simalango	Dorongan agar penerima PKH mengembangkan kemampuan diri.	Ikut pelatihan, tapi tidak rutin.	Menumbuhkan kesadaran hidup mandiri.	Pelatihan kelompok dari pendampingan PKH.	Bermanfaat tapi penerapannya belum merata.	Membantu pendidikan dan hidup layak.	Masyarakat yang sangat membutuhkan.
5. Saut Jaolo Nadeak	Penguatan kemampuan individu dan komunitas.	Aktif memberi kritik & saran kepada pemerintah	Ciptakan masyarakat produktif.	Pelatihan berbasis potensi desa dan evaluasi.	Membantu saat kesulitan ekonomi.	Menekan beban pengeluaran keluarga.	Keluarga dengan anak usia sekolah dan balita.

		desa.					
6. Alboin Gurning	Penciptaan kemandirian melalui pelatihan dan pendampingan.	Ikut kelompok tani dan pelatihan usaha.	Supaya warga miskin bisa punya usaha.	Kelompok tani dan pelatihan pengolahan hasil tani.	Penting saat masuk tahun ajaran baru.	Memberi semangat bagi keluarga miskin.	Penduduk miskin dengan anak sekolah.
7. Darwin Demokrat Samsir	Peningkatan kesejahteraan lewat pelatihan & keterlibatan warga.	Fasilitasi pelatihan & kegiatan warga.	Dorong kemandirian ekonomi warga.	Integrasi PKH ke BUMDes dan pelatihan desa.	Strategi nasional perlindungan sosial.	Bangun kualitas SDM kelompok miskin.	Berdasarkan DTKS dan verifikasi lapangan.
8. Arisan Simboln	Penguatan kapasitas ekonomi warga melalui kerja sama.	Terlibat dalam pengawasaan pelaksanaan PKH.	Bangun produktivitas ekonomi masyarakat.	Pelatihan UKM dan permodalan dari desa.	Sarana perubahan perilaku dan ekonomi.	Kurangi kemiskinan melalui pendidikan.	Keluarga tidak mampu yang sesuai kriteria.
9. Evi Sinurat	Bekali warga dengan keterampilan agar tak bergantung bantuan.	Menjadi penghubung informasi PKH ke warga.	Kurangi ketergantungan melalui usaha kecil.	Edukasi pertanian dan usaha makanan rumahan.	Bantuan pokok bagi keluarga kurang mampu.	Cegah putus sekolah dan jaga kesehatan keluarga.	Rumah tangga miskin dan kelompok rentan.

B. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi Data*)

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Paraduan, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan sesuai prosedur secara administratif, mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan. Namun, aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat belum terlaksana secara optimal. Mayoritas penerima manfaat masih memaknai PKH sebagai bantuan konsumtif, bukan sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Rendahnya partisipasi dalam pelatihan keterampilan, minimnya motivasi, dan tingkat pendidikan yang rendah menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Meski demikian, masyarakat mulai memahami konsep pemberdayaan sebagai upaya membangun kemandirian melalui pelatihan dan pendampingan usaha, meskipun implementasinya masih terbatas pada sebagian kecil penerima.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta dukungan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah desa dan pendamping PKH. Diperlukan peningkatan edukasi dan fasilitasi agar program tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan tunai, tetapi benar-benar mendorong

transformasi sosial ekonomi keluarga miskin menuju kemandirian. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap konteks lokal di Desa Paraduan, serta penekanan pada pentingnya pemberdayaan ekonomi sebagai indikator keberhasilan PKH, bukan semata efektivitas distribusi bantuan. Dengan penguatan strategi pemberdayaan berbasis masyarakat, PKH berpotensi menjadi instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

C. Peran Pemberdayaan Masyarakat

Peran masyarakat dalam pemberdayaan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paraduan masih tergolong rendah, dengan mayoritas penerima manfaat berperan pasif dan hanya melihat bantuan sebagai konsumsi, bukan peluang pengembangan ekonomi. Minimnya keterlibatan dalam pelatihan keterampilan, pembentukan kelompok usaha, serta lemahnya pendampingan dari pihak desa dan pendamping PKH menghambat terwujudnya pemberdayaan yang partisipatif dan transformatif. Temuan ini bertentangan dengan teori-teori pemberdayaan seperti dikemukakan oleh Margayaningsih (2018), Suryani Retno (2015), dan Hutasoit et al. (2024), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Rendahnya motivasi, tingkat pendidikan, dan tidak optimalnya fasilitasi pemerintah menjadi faktor penghambat utama. Meski secara administratif PKH telah berjalan, kesenjangan antara teori dan praktik menunjukkan perlunya strategi inklusif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan peran masyarakat sebagai subjek dalam proses pemberdayaan, bukan sekadar penerima bantuan.

D. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar dapat mandiri secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Paraduan, diketahui bahwa sebagian besar responden memahami bahwa tujuan dari program pemberdayaan adalah agar keluarga miskin tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, melainkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Sebagian penerima manfaat PKH di Desa Paraduan memang menyadari pentingnya kemandirian ekonomi, namun belum seluruhnya mampu menerjemahkan kesadaran tersebut ke dalam tindakan nyata seperti membangun usaha, mengikuti pelatihan, atau mengakses sumber daya lokal yang tersedia. Beberapa informan bahkan menyatakan bahwa mereka hanya fokus menggunakan bantuan PKH untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan dapur, tanpa memiliki rencana untuk membangun

usaha atau mengembangkan keterampilan. Hal ini menandakan bahwa tujuan pemberdayaan sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan kemandirian belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan secara menyeluruh.

Secara teoritis, Erwandi (2022) menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada individu atau kelompok yang lemah agar mereka mampu membebaskan diri dari ketergantungan struktural. Dalam konteks PKH, ini berarti bahwa bantuan yang diberikan harus menjadi pijakan awal menuju kemandirian, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan sesaat. Jika tujuan pemberdayaan hanya dimaknai sebagai bentuk bantuan yang bersifat konsumtif, maka fungsi transformatif dari PKH tidak akan pernah tercapai.

Selain itu, menurut teori dari Hutasoit et al. (2024), tujuan pemberdayaan harus mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengakses sumber daya dan informasi; (2) memperkuat kapasitas individu agar mampu mengambil keputusan yang berdampak positif bagi kehidupannya; dan (3) mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Berdasarkan temuan penelitian, ketiga aspek ini belum tercermin secara maksimal dalam praktik pemberdayaan PKH di Desa Paraduan. Akses informasi masih terbatas, kapasitas pengambilan keputusan ekonomi belum terbentuk, dan partisipasi warga dalam kegiatan produktif masih rendah.

Tujuan pemberdayaan masyarakat seharusnya juga diarahkan pada terbentuknya kesadaran kritis di kalangan warga untuk mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini, Margayaningsih (2018) menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai proses transformasi sosial, bukan hanya sebagai program bantuan. Oleh karena itu, tujuan pemberdayaan tidak cukup hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari individu dan kelompok masyarakat itu sendiri.

Namun, berdasarkan data di lapangan, sebagian besar warga Desa Paraduan masih menunggu arahan atau inisiatif dari pihak luar, seperti pemerintah desa atau pendamping PKH. Mereka belum terbiasa membuat inisiatif atau terlibat secara aktif dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemberdayaan masih berada pada tahap formalitas administratif dalam pelaksanaan program, belum menjadi semangat atau gerakan kultural di masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun secara normatif tujuan pemberdayaan masyarakat dalam Program Keluarga Harapan telah disosialisasikan dan

dikenal oleh sebagian warga, namun dalam praktiknya belum semua penerima manfaat mampu mewujudkan tujuan tersebut dalam bentuk tindakan nyata. Diperlukan pendekatan yang lebih intensif, kontekstual, dan berkelanjutan agar tujuan pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai tujuan pemerintah, melainkan menjadi cita-cita bersama masyarakat dalam mengubah kehidupannya ke arah yang lebih sejahtera dan mandiri.

Persamaannya terletak pada pemahaman umum bahwa tujuan utama dari pemberdayaan melalui PKH adalah untuk mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat miskin. Penelitian di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa sebagian penerima manfaat telah mengetahui pentingnya keluar dari ketergantungan bantuan, sebagaimana halnya dengan responden di Desa Paraduan. Sedangkan Perbedaannya terletak pada konteks lokal dan pelaksanaan teknis program. Penelitian di beberapa wilayah lain menunjukkan bahwa apabila ada dukungan kelembagaan yang kuat dan pendekatan pemberdayaan yang kontekstual serta partisipatif, tujuan PKH sebagai jalan menuju kemandirian lebih mungkin tercapai. Misalnya, di beberapa daerah yang menerapkan pendampingan intensif dan program pelatihan berbasis potensi lokal, penerima manfaat mampu bertransformasi menjadi pelaku ekonomi produktif.

E. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paraduan, strategi pemberdayaan yang diterapkan meliputi pelatihan keterampilan usaha, pendampingan rumah tangga, dan pemanfaatan dana desa untuk membentuk kegiatan ekonomi produktif seperti kelompok usaha bersama (KUBE). Namun demikian, implementasi dari strategi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa sebagian besar penerima PKH belum aktif terlibat dalam kegiatan pelatihan atau usaha produktif. Beberapa informan mengaku belum pernah diikutsertakan dalam pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat makanan ringan, atau mengelola keuangan keluarga. Bahkan, ada yang menyatakan bahwa belum mengetahui adanya program pelatihan sama sekali. Di sisi lain, pihak pemerintah desa menyebutkan bahwa sudah beberapa kali mengadakan pelatihan, namun tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah karena kurangnya minat, motivasi, serta keterbatasan waktu dari para ibu rumah tangga yang menjadi penerima manfaat.

Jika ditinjau dari teori Berutu et al. (2020), strategi pemberdayaan seharusnya meliputi pelatihan, manajemen usaha, penguatan kelembagaan lokal, serta akses kepada

permodalan dan pasar. Dalam hal ini, strategi pemberdayaan harus mampu menjembatani antara potensi masyarakat dengan kebutuhan ekonomi yang ada di wilayahnya. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan pemerintah Desa Paraduan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya diarahkan pada potensi lokal masyarakat seperti pertanian, peternakan skala rumah tangga, atau kerajinan tradisional yang dapat dikembangkan menjadi usaha produktif.

Teori dari Erwandi (2022) juga menekankan bahwa strategi pemberdayaan harus bersifat partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Artinya, strategi tidak boleh dirancang secara top-down semata, tetapi harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam praktiknya di Desa Paraduan, keterlibatan masyarakat dalam merancang strategi pemberdayaan masih minim. Banyak program yang digulirkan tidak berdasarkan hasil musyawarah langsung dengan penerima manfaat, melainkan berdasarkan inisiatif pemerintah desa atau arahan dari pendamping PKH. Hal ini menimbulkan jarak antara strategi yang diterapkan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Lebih lanjut, Hutasoit et al. (2024) menyebutkan bahwa strategi pemberdayaan yang efektif harus berorientasi pada pembentukan perilaku produktif, penguatan jejaring sosial, dan penciptaan lingkungan yang mendukung perubahan. Dalam konteks ini, diperlukan sinergi antara pendamping PKH, perangkat desa, dan lembaga sosial lainnya untuk membangun sistem pemberdayaan yang terintegrasi. Di Desa Paraduan, upaya ke arah tersebut sudah mulai tampak, misalnya melalui rencana kerja sama antara pemerintah desa dan kelompok wanita tani. Namun, inisiatif tersebut masih dalam tahap awal dan belum menyentuh seluruh keluarga penerima manfaat PKH.

Kendala lain dalam penerapan strategi pemberdayaan adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mampu menjadi fasilitator. Pendamping PKH yang ditugaskan di desa hanya satu orang dan tidak dapat menjangkau semua warga secara intensif. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas strategi yang dijalankan, karena keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada kedekatan dan keberlanjutan proses pendampingan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Paraduan sudah ada dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, namun implementasinya belum maksimal. Strategi yang diterapkan belum sepenuhnya berbasis potensi lokal dan belum melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaannya. Untuk itu, ke depan perlu disusun strategi pemberdayaan yang lebih

partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat agar tujuan PKH dalam menciptakan kemandirian ekonomi keluarga miskin dapat benar-benar tercapai.

F. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai dengan syarat tertentu, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Paraduan, mayoritas masyarakat penerima manfaat PKH merasakan manfaat langsung dari program ini, terutama dalam membantu pembiayaan pendidikan anak dan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Namun demikian, sebagian besar masyarakat masih memaknai PKH sebagai bantuan sosial semata, bukan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH diharapkan tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan perilaku di kalangan penerima manfaat agar lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, kesehatan ibu hamil, dan lansia yang berada dalam tanggungan keluarga. Secara teori, ini sesuai dengan konsep kebijakan publik yang dijelaskan oleh Minarni (2014) bahwa kebijakan sosial seperti PKH adalah alat untuk mewujudkan keadilan distributif, yaitu dengan memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial.

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa tujuan ideal tersebut belum sepenuhnya tercapai. Masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan bantuan secara produktif dan hanya mengandalkan PKH sebagai pendapatan utama tanpa ada upaya untuk membangun kemandirian. Sebagian besar responden menyatakan bahwa bantuan PKH mereka gunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, pakaian anak sekolah, atau biaya pengobatan. Sementara itu, belum ada pengalokasian bantuan untuk kegiatan ekonomi seperti modal usaha atau simpanan jangka panjang.

Padahal, jika mengacu pada teori Nainggolan et al. (2020), PKH harus dilihat sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas sosial ekonomi penerima bantuan, bukan sekadar memberikan solusi instan. Dalam praktik pemberdayaan, bantuan seperti PKH harus dipadukan dengan strategi pembangunan kapasitas (*capacity building*), agar penerima manfaat dapat mengembangkan potensi diri dan rumah tangganya. Hal ini belum sepenuhnya terlihat dalam pelaksanaan PKH di Desa Paraduan, di mana pelatihan-pelatihan produktif belum berjalan secara konsisten dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan

masih rendah. Lebih lanjut, Handayani (2013) menyatakan bahwa keberhasilan sebuah program sosial bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan sebagai subjek, bukan hanya objek kebijakan. Dalam konteks ini, program PKH di Desa Paraduan masih menempatkan penerima sebagai penerima pasif, bukan pelaku aktif perubahan. Pendampingan intensif, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta integrasi PKH dengan program desa seperti BUMDes atau pelatihan UMKM, belum berjalan secara maksimal.

Dari sisi kelembagaan, keberadaan pendamping PKH di Desa Paraduan cukup membantu dalam proses verifikasi, sosialisasi, dan pencairan bantuan. Namun, jumlah pendamping yang terbatas menyebabkan proses penguatan kapasitas warga tidak berjalan secara menyeluruh. Padahal, dalam konsep pemberdayaan menurut *Hutasoit et al. (2024)*, keberadaan fasilitator yang mampu mendampingi proses pembelajaran sosial sangat penting dalam mendorong transformasi perilaku dan kemandirian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Paraduan telah berjalan sesuai ketentuan formal dan memberikan dampak positif bagi pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin. Namun demikian, aspek pemberdayaan dalam program ini belum terimplementasi secara optimal. Program PKH masih lebih berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial daripada sebagai sarana pemberdayaan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan lembaga sosial lainnya untuk memperluas peran PKH sebagai program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan transformatif.

G. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui intervensi sosial bersyarat yang mendorong akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Paraduan, sebagian besar informan memahami bahwa tujuan utama PKH adalah untuk membantu agar anak-anak tetap sekolah, ibu hamil dan balita mendapatkan layanan kesehatan, serta agar keluarga miskin dapat hidup lebih layak. Namun dalam pelaksanaannya, tujuan-tujuan tersebut belum seluruhnya tercapai secara merata di kalangan penerima manfaat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Permensos No. 1 Tahun 2018, PKH bertujuan untuk: (1) mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin; (2) meningkatkan akses dan kualitas

layanan pendidikan dan kesehatan; dan (3) mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pertama dan kedua telah berjalan cukup baik. Mayoritas keluarga penerima manfaat PKH mampu menyekolahkan anak-anaknya dan memanfaatkan fasilitas posyandu atau puskesmas untuk kebutuhan ibu hamil dan balita. Namun aspek ketiga, yaitu perubahan perilaku menuju produktivitas dan kemandirian, belum terlihat secara signifikan.

Hal ini sejalan dengan teori Nainggolan et al. (2020) yang menyatakan bahwa program bantuan sosial seperti PKH memiliki dua tujuan utama, yakni tujuan jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan tujuan jangka panjang berupa transformasi sosial dan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan, bantuan PKH lebih dirasakan dalam jangka pendek, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar uang sekolah, dan membeli kebutuhan kesehatan. Akan tetapi, sangat sedikit dari mereka yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk investasi jangka panjang seperti menabung atau memulai usaha kecil.

Menurut teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Erwandi (2022) tujuan dari pemberdayaan sosial adalah untuk menciptakan individu dan kelompok masyarakat yang mandiri dan tidak bergantung secara terus-menerus pada bantuan. Jika dikaitkan dengan tujuan PKH, maka seharusnya program ini tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga transformatif. Namun dalam praktiknya di Desa Paraduan, sebagian besar penerima manfaat belum mengalami perubahan signifikan dalam hal kemampuan ekonomi maupun pola pikir kemandirian. Bantuan yang diterima masih dianggap sebagai hak semata, bukan sebagai peluang untuk memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh.

Selanjutnya, berdasarkan teori Hutasoit et al. (2024), keberhasilan suatu program pemberdayaan dapat diukur dari sejauh mana tujuan program tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berdaya dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks PKH, hal ini mencakup kemampuan penerima manfaat untuk tetap menyekolahkan anak, menjaga kesehatan keluarga, serta memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengelola keuangan rumah tangga secara bijak. Berdasarkan hasil penelitian, hanya sebagian kecil keluarga yang menunjukkan perubahan ke arah tersebut. Ini menunjukkan bahwa tujuan PKH sebagai program pemberdayaan belum tercapai secara optimal.

Faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuan PKH di Desa Paraduan antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan dan literasi finansial masyarakat, minimnya pelatihan kewirausahaan, serta keterbatasan tenaga pendamping yang seharusnya menjadi agen

perubahan sosial. Selain itu, belum adanya integrasi antara PKH dan program pemberdayaan desa lainnya seperti BUMDes atau pelatihan keterampilan juga menjadi kendala dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan yang komprehensif..

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan Program Keluarga Harapan sebagaimana yang diharapkan dalam teori dan regulasi nasional sebagian besar telah tercapai dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Namun dalam aspek pemberdayaan dan perubahan perilaku menuju kemandirian ekonomi, tujuan tersebut belum terwujud secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pendamping PKH, integrasi dengan program pemberdayaan lokal, dan edukasi berkelanjutan agar tujuan PKH sebagai program perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara holistik.

H. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial bersyarat dirancang untuk memberikan manfaat yang bersifat langsung maupun tidak langsung kepada keluarga miskin. Manfaat langsung mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sedangkan manfaat tidak langsung mencakup perubahan perilaku ke arah yang lebih produktif, peningkatan kualitas hidup, dan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Paraduan, manfaat utama PKH yang dirasakan oleh masyarakat adalah berupa bantuan dana yang sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan harian, seperti membayar uang sekolah anak, membeli perlengkapan sekolah, membeli kebutuhan pokok, dan biaya transportasi ke fasilitas kesehatan.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Siahaan dan Pinem (2024) yang menyatakan bahwa bantuan sosial seperti PKH berperan dalam menstabilkan kondisi ekonomi keluarga miskin serta meningkatkan daya beli mereka. Program ini berfungsi sebagai penyangga ekonomi keluarga, terutama pada saat-saat krisis atau dalam masa pertumbuhan anak yang membutuhkan biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi. Di Desa Paraduan, keluarga penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan keberadaan PKH, khususnya ketika menjelang tahun ajaran baru atau ketika ada anggota keluarga yang sakit.

Manfaat lainnya yang teridentifikasi dari hasil penelitian adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan. Beberapa responden menyatakan bahwa sebelum menerima bantuan PKH, mereka tidak rutin membawa anak ke sekolah atau ibu hamil ke posyandu. Namun setelah menjadi peserta PKH, mereka mulai disiplin dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti kehadiran sekolah anak dan

pemeriksaan kehamilan. Hal ini menunjukkan bahwa PKH berhasil mendorong kepatuhan penerima terhadap layanan sosial dasar, sebagaimana tujuan utamanya dalam regulasi Permensos No. 1 Tahun 2018.

Secara teoritis, Nainggolan et al. (2020) juga menyebutkan bahwa PKH memiliki potensi sebagai program edukatif karena selain memberikan dana tunai, juga mendorong perubahan perilaku sosial. Ini terlihat di lapangan, meskipun belum sepenuhnya merata, bahwa sebagian keluarga penerima mulai memiliki semangat untuk hidup lebih teratur, merencanakan kebutuhan anak, dan menghargai pendidikan sebagai sarana untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Meskipun manfaat yang bersifat produktif seperti membuka usaha sendiri masih sangat terbatas, namun PKH telah memberi pondasi awal berupa kestabilan ekonomi keluarga.

Namun demikian, manfaat PKH belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara, hanya sebagian kecil responden yang menyatakan menggunakan dana PKH untuk modal usaha kecil atau ditabung. Sebagian besar lainnya menghabiskan dana tersebut untuk keperluan harian tanpa ada strategi ekonomi lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan PKH masih bersifat konsumtif dan belum optimal sebagai sarana pemberdayaan. Padahal, menurut Erwandi (2022), pemberdayaan yang efektif adalah ketika bantuan mampu merangsang masyarakat untuk membangun kemandirian dan menciptakan nilai tambah dalam ekonomi rumah tangga mereka.

Faktor yang menyebabkan belum optimalnya manfaat PKH dalam pemberdayaan adalah minimnya pelatihan kewirausahaan, tidak adanya pendampingan usaha produktif, serta belum adanya integrasi antara PKH dan program ekonomi desa seperti BUMDes. Sejumlah keluarga memiliki potensi untuk berkembang, namun tidak didukung oleh pelatihan atau bantuan modal lanjutan. Akibatnya, dana bantuan habis tanpa memberi dampak jangka panjang terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Paraduan telah dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan finansial untuk kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Program ini juga mendorong kepatuhan terhadap layanan sosial dan menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan. Namun manfaat produktif dan pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya terwujud karena keterbatasan strategi lanjutan. Oleh karena itu, agar manfaat PKH tidak hanya bersifat sesaat, diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan bantuan dengan pelatihan, pendampingan usaha, dan akses ke program pemberdayaan ekonomi lainnya.

I. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) secara nasional telah ditetapkan melalui kebijakan pemerintah, yaitu keluarga miskin dan rentan miskin yang memenuhi kriteria dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sasaran ini mencakup rumah tangga yang memiliki komponen anggota keluarga seperti ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Paraduan, sasaran PKH secara umum telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Mayoritas penerima manfaat yang diwawancarai termasuk dalam kategori keluarga miskin dengan anak sekolah dan ibu hamil.

Beberapa informan mengaku telah menerima PKH sejak bertahun-tahun karena anak-anak mereka masih duduk di bangku sekolah dan istri sedang dalam masa kehamilan. Ini menunjukkan bahwa proses penentuan sasaran awal sudah tepat dan sesuai dengan prinsip targeting dalam program bantuan sosial. Bahkan dalam proses awal, terdapat verifikasi dan validasi data oleh pemerintah desa bersama pendamping PKH, yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Temuan ini sesuai dengan teori Handayani (2013) yang menyatakan bahwa kebijakan publik, khususnya di bidang sosial, harus diarahkan pada kelompok sasaran yang paling membutuhkan bantuan negara. Penetapan sasaran harus berdasarkan data yang akurat dan melalui proses validasi yang adil agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dalam konteks Desa Paraduan, peran pendamping PKH dan pemerintah desa dalam proses ini sudah cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis.

Namun demikian, dari sisi pelaksanaan di lapangan, terdapat beberapa catatan penting. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada sebagian warga yang merasa masih tergolong miskin namun tidak mendapatkan bantuan PKH. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara data DTKS dan kondisi faktual masyarakat di lapangan. Beberapa penerima manfaat juga mengaku bahwa mereka tidak tahu mengapa masih terdaftar sebagai peserta PKH meskipun kondisi ekonomi mereka sudah relatif lebih baik dibanding sebelumnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah inclusion error dan exclusion error dalam teori kebijakan sosial, yaitu kesalahan dalam mencakup dan mengecualikan sasaran program.

Teori Minarni (2014) juga menekankan bahwa keberhasilan program sosial bergantung pada sejauh mana proses penentuan sasaran dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam konteks ini, pemerintah desa dan pendamping PKH memiliki peran sentral dalam menjelaskan mekanisme sasaran kepada masyarakat agar tidak

terjadi kecemburuan sosial dan persepsi negatif terhadap program. Hal ini penting mengingat adanya beberapa warga yang merasa tidak dilibatkan atau tidak mendapat informasi terkait kriteria sasaran PKH.

Selain itu, berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018, kriteria sasaran PKH mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sehingga penentuan peserta seharusnya tidak hanya berdasarkan tingkat kemiskinan tetapi juga mempertimbangkan keberadaan komponen yang relevan di dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan di Desa Paraduan, pendekatan ini telah diterapkan melalui pendataan berbasis rumah tangga, namun penguatan sosialisasi dan evaluasi berkala masih perlu ditingkatkan.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa belum seluruh masyarakat memahami alasan mereka masuk atau tidak masuk ke dalam daftar penerima PKH. Ini mengindikasikan bahwa meskipun secara administratif sasaran program sudah ditentukan, namun secara sosial masih ada kesenjangan persepsi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat komunikasi publik terkait sasaran dan kriteria program agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan atau prasangka negatif terhadap pelaksana PKH.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum, sasaran Program Keluarga Harapan di Desa Paraduan telah sesuai dengan ketentuan nasional dan kriteria dalam DTKS. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam hal pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penentuan sasaran, serta perlunya evaluasi berkala agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Proses validasi yang transparan, edukasi kepada masyarakat, dan keterlibatan aktif semua pihak sangat diperlukan agar sasaran program dapat lebih adil, akurat, dan diterima secara sosial.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep pemberdayaan telah mulai terbentuk, meskipun belum sepenuhnya disertai dengan implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar penerima manfaat masih memaknai pemberdayaan secara sempit sebagai bentuk bantuan semata, bukan sebagai proses menuju kemandirian. Peran masyarakat dalam pelaksanaan program juga masih bersifat pasif, di mana mereka lebih berfungsi sebagai objek penerima bantuan daripada subjek yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian

ekonomi dan kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai, karena keterbatasan motivasi, keterampilan, serta belum optimalnya dukungan dari pemerintah desa dan pendamping PKH. Strategi pemberdayaan yang telah dirancang, seperti pelatihan dan pendampingan, belum dijalankan secara konsisten dan belum berbasis pada potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum telah sesuai dengan ketentuan nasional dan telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Namun, manfaat jangka panjang seperti perubahan perilaku dan kemandirian ekonomi masih belum terlihat secara signifikan. Tujuan PKH untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dalam aspek sosial dan ekonomi belum sepenuhnya tercapai karena masih lemahnya integrasi program dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Meskipun begitu, manfaat PKH sebagai penyangga ekonomi keluarga miskin cukup dirasakan oleh para penerima, walaupun sebagian besar masih bersifat konsumtif. Adapun dari sisi sasaran program, sebagian besar keluarga penerima manfaat telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, namun masih terdapat kendala dalam proses validasi dan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme sasaran program. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan penguatan dari berbagai aspek agar PKH tidak hanya menjadi bantuan sementara, tetapi benar-benar menjadi alat pemberdayaan yang mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, M. N., Ati, N. U., & Abidin, A. Z. (2021). Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. *Respon Publik: Journal of Public Administration*, 15(9), 44–50. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/12415>
- Afdhal, A., Mustanir, A., Ilmi, A., Aksal, F., Iwan, M., Kusnadi, H., Fauzan, R., Duwi, A., Rina, S., & Abdurrohman, W. (2023). Pemberdayaan masyarakat (Cetakan pertama). PT Global Eksekutif Teknologi. <http://www.globaleksekutifteknologi.co.id>
- Afifah, W. (2023). Upaya pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan tata boga di Desa Lueng Keubeu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 309. <https://doi.org/10.54621/jkdm.v2i2.751>
- Aminah, & Roikan. (2019). Pengantar metode penelitian kualitatif (Cetakan pertama). Prenada Media.
- Anggraini. (2018). Efektivitas pendampingan desa dalam meningkatkan pemberdayaan desa di Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang [Skripsi,

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3499>

- Berutu, N., Dinatingrat, A., & Hodriani, H. (2023). Pendampingan remaja catin dalam rangka persiapan ekonomi keluarga melalui pembuatan snack pangan lokal nusantara guna percepatan penurunan stunting. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 650.
- Berutu, N., Siregar, Z., Budiwiwaramulja, D., & Hodriani, H. (2020). PKM pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk olahan pisang sale Sidodadi Ramunia. *Pelita Masyarakat*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v1i2.3219>
- Brutu, S., Nainggolan, J. A., Sembiring, G. R., Trisna, W. A., Nainggolan, G., Andini, P., & Prayetno. (2024). Analisis hubungan status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik warga negara (Studi kasus di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan). *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1588>
- Elkana, Y., Siburian, T., & Ivanna, J. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Majalah Ilmiah Methoda*, 14(2), 189–193. <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol14No2.pp189-193>
- Erwandi, A. (2022). Sistem pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Mungguk Gelombang Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. *FOKUS (Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang)*, 20(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i1.586>
- Fajar Utomo, L., & Effendi, D. (2022). Gerakan pemanfaatan lahan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta. *Jurnal Caraka Prabu*, 6(2). <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/932/374>
- Fatine, S. (2022). Pemberdayaan masyarakat kota di bidang ekonomi melalui UMKM Ladu Arai Pinang di Lubuk Buaya Kota Padang. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 78–83. <https://doi.org/10.34312/ljpmt.v1i2.15346>
- Fazli Rachman. (2021). Partisipasi warga untuk BUM Desa berkelanjutan. Dalam *BUM Desa sebagai kekuatan ekonomi* (Edisi pertama, hal. 184–192). Penerbit Lakeisha.
- Fitri, F., Tamaria, T., & Ivanna, J. (2024). Peran organisasi karang taruna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 16354–16363. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12533>
- Gurning, F. T. R., & Ivanna, J. (2022). The role of social capital in improving quality village-owned enterprises (BUMDes). *Randwick International of Social Science Journal*, 3(2), 310–321. <https://doi.org/10.47175/rissj.v3i2.438>

- Handayani. (2013). Evaluasi kebijakan program pengembangan Kecamatan Singkil Kota Manado. *Journal Governance*, 5(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/1479>
- Hartika, D., Harahap, N. F., Sulvina, A., Sihombing, G. M., & Ivanna, J. (2024). Kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kelurahan Teladan Timur. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(6).
<https://doi.org/10.31604/jips.v11i6.2024>
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Inanna, Mattunruang, A. A., Nursaeni, Yusriani, Nahriana, Silalahi, D., Hasyim, S. H., Rahmat, A., Ulfah, Y. F., & Arisah, N. (2022). *Metode penelitian kualitatif (Cetakan pertama)*.